



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KATA PENGANTAR

Patut kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian Kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Pelaporan Kinerja. LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2030 dan Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 - 2030 yang akan dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat harus melaksanakan tugas secara Akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Patut kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian Kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Pelaporan Kinerja. LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2030 dan Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 - 2030 yang akan dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat harus melaksanakan tugas secara Akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Segala masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan Penyusunan LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga LAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi tolak ukur perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Tambolaka, 15 Januari 2026

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya



Agustinus H. Theedens, S.Hut
Pembina Tk.I- IV/b
Nip.19690211 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP	2
C. PROFIL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	8
C. PERENCANAAN ANGGARAN	8
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
B. REALISASI ANGGARAN	12
 BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
 LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. RENCANA STRATEGIS (RS)	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya pelaporan kinerja sebagai alat pengukur pencapaian target program yang telah direncanakan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Laporan Kinerja ini menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana Bagian Pemerintahan berhasil mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaporan ini juga mencakup analisis atas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama satu tahun pelaksanaan kegiatan, serta memberikan gambaran terkait capaian yang diperoleh dari pelaksanaan program kerja. Melalui penyusunan laporan ini, Bagian Pemerintahan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

Pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Pelaporan Kinerja.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tugas Pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya Bidang Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Persiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah Daerah bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;

B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

1. Tujuan LAKIP

Tujuan pembuatan LAKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat LAKIP

Manfaat pembuatan LAKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

2. Aspek Strategis

Adapun aspek strategis ini meliputi Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat :

- a. Tugas Pokok
 - Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya Bidang Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Fungsi
 - Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

- Persiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan Rakyat;
- Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat.

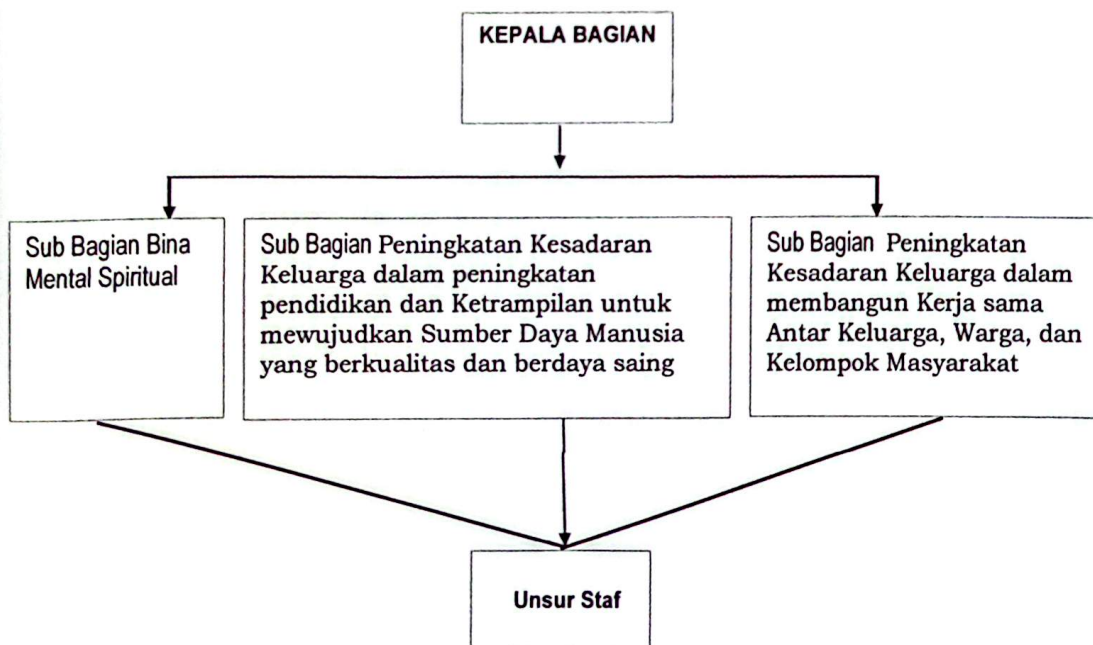
3. Struktur Organisasi

a. Menurut Struktur Jabatan

Struktur jabatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kepala Bagian
2. Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Sub Bagian Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 - c. Sub Bagian Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

b. Bagan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat



4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, sampai dengan bulan desember tahun 2025 berjumlah 9 orang terdiri dari (Pegawai Negeri Sipil 4 orang, PPPK 4 orang dan Pegawai Kontrak Daerah 1 orang). Adapun keadaan pegawai yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan rincian sebagai berikut:

A. Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PNS	
	a. S1	2 Orang
	b. D3	2 Orang
2.	PPPK	
	a. S1	2 Orang
	b. SMA	2 Orang
		-
3.	NON PNS	
	a. SMA	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

B. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	2
3.	Golongan III	5
4.	Golongan IV	1

C. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan

No	Diklat	Jumlah
1.	Diklat PIM II	-
2.	Diklat PIM III	1
3.	Diklat PIM IV	

D. Menurut Jabatan Eselonering dan Fungsional

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon III/a	1

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Sepeda Motor Yamaha Byson	1		Rusak	
2	Mesin Ketik	1			
3	Lemari Rak Kayu	1			Rusak Berat
4	Filling Besi/Metal	2	Baik		
5	Brand Kas	1	Baik		
6	Lemari kayu	2			Rusak Berat
7	Alat Pemotong Kertas	1		Rusak	
8	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik		
9	Lemari Kayu	4	Baik		
10	Mesin Laminating	1		Rusak	
11	Kursi Kayu	4	Baik		
12	Meja Podium	1		Rusak	
13	Kipas Angin	1			Rusak Berat
14	Dispenser	1			Rusak Berat
15	Handy Cam	1			Rusak Berat
16	P.C Unit/ Komputer	3			Rusak Berat
17	P.C Unit/ Komputer	1	Baik		
18	Laptop	3	Baik		
19	Laptop	2		Rusak	
20	Hard Disk	1			Rusak Berat
21	Printer	1	Baik		
22	Printer	2			Rusak Berat
23	Flashdisk	4			Rusak Berat
24	Printer	5			Rusak Berat
25	UPS	2		Rusak	
26	Stabilizer/Stavolt	1		Rusak	
27	Modem	1			Rusak Berat
28	Meja Kerja Pej. Eselon III	1	Baik		
29	Meja Kerja	2			Rusak Berat
30	Camera Electronic	1	Baik	Rusak	
31	Mesin Jilid	1	Baik	1	
32	Laptop Acer	1	Baik		
33	Filling Besi/VIP	1	Baik		
34	Speaker	1	Baik		Rusak Berat

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LAKIP.

Sedang Batang Tubuh LAKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LAKIP, Profil Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sistematika Penyajian LAKIP

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2026

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LAKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2030 dan memperhatikan RPJMD Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pernyataan Visi

Visi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA YANG MANDIRI, SEHAT DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN”**.

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan menyeluruh dan berkelanjutan; .
- b. Mewujudkan demokrasi serta toleransi antar umat beragama dan mendorong pemuda untuk berkreatif dan berpartisipasi aktif dalam dalam pembangunan;
- c. Mewujudkan pengelolaan dana bantuan pemerintah bagi pemberdayaan kelompok umat beragama.

3. Penetapan Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Adapun tujuan strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait selalu melakukan pembinaan kepada Lembaga pendidikan dan kesehatan.

b. Mengkoordinir Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait selalu melakukan pembinaan kepada organisasi politik, organisasi pemuda dan Olahraga serta Lembaga Agama.

c. Mengkoordinir Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait untuk mendorong masyarakat agar mendayagunakan bantuan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Penetapan Sasaran

Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yakni : Meningkatnya Toleransi antar umat beragama.

5. Penetapan Program

Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 mempunyai program kerja meliputi:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja (PK) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2026, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Toleransi antar umat beragama	Cakupan Pelayanan Keagamaan	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Kegiatan Natal, Paskah, Hewan Kurban • Bantuan Sosial keagamaan	487.775.200

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2026 sebesar Rp. **4.917.917.000** terdiri dari :

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat = Rp. 4.783.564.700
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. = Rp. 134.352.300
c. Jumlah = Rp. **4.917.917.000**

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya setelah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2026 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya setelah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2026 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (*Pengukuran Kinerja Kegiatan*) dan Formulir PPS (*Pengukuran Pencapaian Sasaran*).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan. Formulir PKK dan PPS menjadi lampiran.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam "*Skala Pengukuran Ordinal*" sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai 1 (satu) sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 92%. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan 1 (satu) sasaran sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut ini :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	92%

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Toleransi antar umat beragama

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 92 %. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 (Dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pelayanan Keagamaan	100	92	92
	Rata-rata			92

Dari indikator sasaran tersebut nampak bahwa persentase nilai kinerja yang dicapai adalah 92 %. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan 1 sasaran tersebut di atas pada tahun anggaran 2025 mencapai kinerja **Sangat Berhasil**. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama.

Adapun indikator yang mewakili tingkat capaian kinerja sasaran tersebut adalah terlaksananya perayaan hari-hari besar keagamaan dan terjalinnya toleransi antara 5 agama dimana:

- Terlaksananya kegiatan Paskah Bersama dan kegiatan Natal Bersama
- Terlaksananya kegiatan Urusan Haji.
- Terlaksananya kegiatan Hari Raya Idul Adha

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Toleransi antar umat beragama

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 92 %. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 (Dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pelayanan Keagamaan	100	92	92
	Rata-rata			92

Dari indikator sasaran tersebut nampak bahwa persentase nilai kinerja yang dicapai adalah 92 %. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan 1 sasaran tersebut di atas pada tahun anggaran 2025 mencapai kinerja **Sangat Berhasil**. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama.

Adapun indikator yang mewakili tingkat capaian kinerja sasaran tersebut adalah terlaksananya perayaan hari-hari besar keagamaan dan terjalannya toleransi antara 5 agama dimana:

- Terlaksananya kegiatan Paskah Bersama dan kegiatan Natal Bersama
- Terlaksananya kegiatan Urusan Haji.
- Terlaksananya kegiatan Hari Raya Idul Adha

	Daya manusia yang Berkualitas dan berdaya saing			
10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama dan Kelompok Masyarakat	35.405.000,-	35.405.000,-	100
	Total	5.547.092.624,-	5.122.793.088,-	92%

Anggaran langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebesar **Rp. 5.547.092.624,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 5.122.793.088,-atau 92 %**.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inansi Pemerintahan (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa pencaaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat telah mencapai sasaran dimana meningkatya toleransi antar umat beragama.

Kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 15 Januari 2026

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya



Agustinus H. Theedens, S.Hut

Pembina Tk.I – IV/b

NIP.19690211 199402 1 002

Lampiran :1

RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

VISI : “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang mandiri, sehat, dengan semangat persatuan dan Kesatuan”.

MISI Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kabupaten Sumba Barat Daya:

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui koordinasi yang menyeluruh dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan demokrasi serta toleransi antar umat beragama dan mendorong pemuda untuk berkreatif dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
3. Mewujudkan pengelolaan dana bantuan pemerintah bagi pemberdayaan kelompok umat beragama.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya Toleransi antar umat beragama	Cakupan Pelayanan Keagamaan	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tambolaka, 15 Januari 2026

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya


Agustinus H. Theedens, S.Hut
Pembina Tk.I – IV/b
NIP.19690211 199402 1 002

Lampiran :2. Rencana Kinerja Tahunan

Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Toleransi antar umat beragama	Cakupan Pelayanan Keagamaan	6

Tambolaka, 15 Januari 2026

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya


Agustinus H. Theedens, S.Hut
Pembina Tk.I – IV/b
NIP.19690211 199402 1 002

Lampiran :3.

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat
TAHUN ANGGARAN : 2025

SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN					%Capaian Kinerja	Ke t
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	satu an	Targ et	realis asi		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya Toleransi antar umat beragama	Cakupan Pelayanan Keagamaan	Program Pemerintah an dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiata n Fasilitas i Pengelol aan Bina Mental Spiritual	Input: Dana Output: terlaksa nanya kegiatan Paskah dan Natal bersama , UDG, Pespara ni dan Hari Kurban Outcome : terwujud nya kerukun an hidup antar uamat beragam a	RP Org	6	6	99	

Tambolaka, 15 Januari 2026

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya

Agustinus H. Theedens, S.Hut

Pembina Tk.I- IV/b

NIP.19690211 199402 1 002